

APBD PEMPROV JATENG 2024 TELAH DISETUJUI, INI BESARANNYA



Sumber Gambar:

<https://tuturpedia.com/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-19.15.54.jpeg>

Isi Berita:

Solopos.com, SEMARANG — DPRD Jawa Tengah (Jateng) telah menyetujui Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2024. Dalam APBD itu, anggaran belanja Pemprov Jateng 2024 disetujui mencapai Rp28,5 triliun.

“Dengan disetujui rancangan keputusan itu, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023,” kata Ketua DPRD Jateng, Sumanto, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (29/11/2023).

Disetujui anggaran tersebut setelah adanya kesepakatan dalam pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah.

Dalam laporannya, Banggar juga memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya dalam implementasi kegiatan dan program perangkat daerah agar difokuskan pada persoalan utama, antara lain penanganan kemiskinan, penanganan stunting, penegakan keadilan sektor pendidikan (penganggaran Bosda Jateng serta insentif guru keagamaan dan madrasah).

Rekomendasi lainnya adalah implementasi penganggaran agar difokuskan pada pelayanan dasar dengan standar layanan minimum sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Serta ketersediaan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat selama tahun politik.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari DPRD Jateng guna memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Jateng.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh fraksi atas proses pembahasan intens sehingga RAPBD tahun 2024 bisa disepakati hari ini,” katanya.

Mendagri

Proses berikutnya, kesepakatan APBD Jateng 2024 tersebut akan diserahkan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari.

“Selanjutnya sesuai tahapan dan mekanisme rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi,” katanya.

Nana menjelaskan, bahwa semua program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terakomodasi dalam RAPBD 2024.

Untuk program bidang pendidikan, Bosda diarahkan untuk memberikan pendampingan pembiayaan bagi sekolah swasta yang juga telah mendapatkan alokasi anggaran BOS. Di dalamnya juga terdapat anggaran untuk hibah bidang pendidikan keagamaan, bantuan insentif pengajar pendidikan, serta Bosda Madrasah Aliah.

Pada bidang pertanian, anggaran difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan meningkatkan nilai tukar petani. Salah satunya adalah alokasi asuransi usaha tani padi, guna memberikan perlindungan kepada petani yang mengalami gagal panen.

Selain itu, Pemprov Jateng juga fokus dalam penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, lalu upaya menjaga laju inflasi di Jawa Tengah, serta pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/catat-apbd-pemprov-jateng-2024-telah-disetujui-ini-besarannya-1808270>, Catat! APBD Pemprov Jateng 2024 Telah Disetujui, Ini Besarannya”, tanggal 29 November 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7063478/apbd-jateng-2024-disepakati-rp-28-5-t-ini-rekomendasi-prioritasnya>, “APBD Jateng 2024 Disepakati Rp 28,5 T, Ini Rekomendasi Prioritasnya”, tanggal 29 November 2023.

3. <https://tuturpedia.com/sepakati-apbd-pemprov-jateng-2024-sebesar-rp-285-triliun-inilah-deretan-program-yang-akan-diprioritaskan/>, “Sepakat! APBD Pemprov Jateng 2024 Sebesar Rp 28,5 Triliun, Inilah Deretan Program yang Akan Diprioritaskan”, tanggal 29 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*